

BAB III

PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT TANPA JAMINAN OLEH BANK RAKYAT INDONESIA UNIT MOHAMMAD TOHA

A. Permohonan dan Persyaratan Kredit Usaha Rakyat Tanpa Jaminan

Calon debitur dalam mengajukan permohonan kredit usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan dilakukan secara tertulis kepada pihak BRI Unit Mohammad Toha. Permohonan kredit tersebut berbentuk perjanjian baku, formulir permohonan pengajuan kredit sudah disediakan oleh pihak bank, dengan demikian calon debitur hanya tinggal mengisi bagian kosong yang perlu diisi beserta tanda tangan dalam formulir tersebut tanpa ada proses negosiasi syarat-syarat yang ada dalam permohonan tersebut.

Hasil wawancara dengan Sandi Setiwan selaku PFA KUR Mikro Unit Mohammad Toha pada tanggal 5 Maret 2015 pukul 11.26 wib. Fasilitas kredit usaha rakyat (KUR) yang disediakan oleh BRI Unit Mohammad Toha tanpa jaminan sampai dengan Rp. 5.000.000.- dan yang dapat memperoleh fasilitas kredit pinjaman merupakan usaha mikro, kecil dan menengah yang masih produktif yang memiliki kelayakan usaha menurut BRI dan untuk dapat diberikan kredit, *account officer* BRI Unit Mohammad Toha akan melakukan survei langsung terhadap usaha calon debitur mengenai kepemilikan usaha, modal usaha serta dokumen yang dianggap penting sebagai bahan dalam putusan pemberian kredit. Pada tahap permohonan kredit BRI Unit Mohammad Toha calon debitur tidak diperbolehkan untuk memberikan kuasa kepada pihak lain dengan alasan apapun juga dikerenakan untuk menghindari penipuan ataupun tindakan pidana

lainnya, sekaligus merupakan suatu bentuk kehati-hatian bank dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat.

Dalam menilai permohonan Kredit Usaha Rakyat Tanpa jaminan oleh Unit Mohammad Toha, bank perlu memperhatikan prinsip sebagai berikut :¹³⁸

1. Bank hanya memberikan kredit apabila permohonan kredit diajukan secara tertulis. Hal ini berlaku baik untuk kredit baru, perpanjangan jangka waktu, tambahan kredit, maupun permohonan perubahan persyaratan kredit.
2. Permohonan kredit harus memuat informasi yang lengkap dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank.
3. Bank harus memastikan kebenaran data informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit.

Calon debitur diharuskan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam hal pengajuan permohonan kredit usaha rakyat (KUR) tanpa jaminan. KUR tanpa jaminan diperkenalkan sebagai kredit yang mudah didapat maka syarat-syarat yang ditetapkan pun sangat sederhana. Syarat-syarat yang perlu disertakan adalah bukti identitas diri berupa foto copy kartu tanda penduduk (KTP) dan foto copy kartu keluarga (KK). Demikian Hasil wawancara dengan Sandi Setiawan selaku PFA KUR Mikro Unit Mohammad Toha pada tanggal 5 Maret 2015 pukul 11.26 wib).

Berikut ini akan dijelaskan tentang persyaratan Kredit Usaha Rakyat

1. Persyaratan KUR s/d Rp.500 juta¹³⁹

¹³⁸ Gunarto Suhardi, *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 96.

| keterangan | Persyaratan |
|-------------------|---|
| Calon debitur | Individu (Perorangan/ badan hukum), kelompok, koperasi yang melakukan usaha produktif yang layak |
| Lama Usaha | Minimal 6 Bulan |
| Besar Kredit | Maksimal Rp. 500 juta |
| Bentuk Kredit | 1. KMK Menurun – maksimal 3 tahun 2. KI maksimal 5 tahun |
| Suku Bunga | Efektif maksimal 16% |
| Perijinan | 1. s/d Rp 100 juta : SIUP, TDP & SITU atau Surat Keterangan dari Lurah/ Kepala Desa 2. > Rp. 100 juta : minimal SIUP atau sesuai ketentuan yang berlaku |
| Legalitas | 1. Individu : KTP & KK 2. Kelompok : Surat pengukuhan dari instansi terkait atau surat keterangan dari Kepala Desa/ Kelurahan 3. Koperasi/ Badan Usaha lain : sesuai ketentuan yang berlaku |
| Agunan | 1. Pokok : baik untuk KUR Modal Kerja maupun KUR Investasi adalah usaha atau tempat usaha yang dibiayai. Proyek yang dibiayai <i>cashflownya</i> mampu memenuhi seluruh kewajiban kepada bank (layak) |

¹³⁹ www.bri.co.id diakses pada tanggal 13 Februari 2015 pada pukul 14.24 wib.

| | |
|--|--------------------------|
| | 2. Tambahan: tidak wajib |
|--|--------------------------|

Tabel 1 : Persyaratan KUR s/d Rp.500 juta

2. Persyaratan KUR (Mikro) s/d Rp.5 juta¹⁴⁰

Tabel 2 : Persyaratan KUR tanpa Jaminan (Mikro) s/d Rp.5 juta

| Keterangan | Persyaratan |
|---------------|--|
| Calon Debitur | Individu yang melakukan usaha produktif yang layak |
| Lama Usaha | Minimal 6 Bulan |
| Besar Kredit | Maksimal Rp. 5 Juta |
| Bentuk Kredit | KMK atau KI menurun maksimal 3 tahun |
| Suku Bunga | Efektif maksimal 1,125% flat rate |
| Prov dan adm | Tidak dipungut |
| Legalitas | KTP dan KK |
| Agunan | 1. Pokok : baik untuk KUR Modal Kerja maupun KUR Investasi adalah usaha atau tempat usaha yang dibiayai Proyek yang dibiayai <i>cash flow</i> nya mampu memenuhi seluruh kewajiban kepada bank (layak) 2. Tambahan : tidak wajib dipenuhi |

3. KUR *Linkage Program*¹⁴¹

¹⁴⁰ www.bri.co.id *Ibid.*

Tabel 3 : KUR Linkage Program

| Keterangan | Persyaratan |
|---------------|---|
| Calon Debitur | BKD, KSP/USP, BMT & LKM Lainnya & tidak mempunyai Tunggakan |
| Lama Usaha | Minimal 6 bulan |
| Besar Kredit | maksimal Rp 500 juta Pinjaman BKD, KSP/USP, BMT, LKM ke <i>end user</i> maksimal Rp 5 juta |
| Jenis Kredit | KMK menurun maksimal 3 tahun |
| Suku Bunga | Efektif maksimal 16% pa |
| Prov dan Adm | Tidak dipungut |
| Legalitas | <ol style="list-style-type: none"> 1. AD/ART 2. Memiliki ijin usaha dari yang berwenang 3. Pengurus aktif |
| Agunan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pokok : baik untuk KUR Modal Kerja maupun KUR Investasi adalah usaha atau tempat usaha yang dibiayai. Proyek yang dibiayai <i>cashflownya</i> mampu memenuhi seluruh kewajiban kepada bank (layak) 2. Tambahan : tidak wajib dipenuhi |

¹⁴¹ www.bri.co.id *Ibid.*

B. Pemberian dan Pencairan Kredit Usaha Rakyat Tanpa Jaminan

Calon debitur akan memperoleh keputusan kredit yang berisi persetujuan akan adanya pemberian kredit usaha rakyat sesuai dengan permohonan yang diajukan. Keputusan persetujuan permohonan kredit berupa mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan kredit dari calon debitur. Pihak BRI Unit Mohammad Toha akan memberitahukan kepada calon debitur untuk mengkonfirmasi kembali beberapa hari menurut hari yang telah ditentukan oleh pihak bank setelah pengajuan permohonan kredit. Biasanya pemberian putusan dilakukan 3-5 hari setelah pendaftaran permohonan kredit usaha rakyat. Hasil wawancara dengan Sandi Setiwan selaku PFA KUR Mikro Unit Mohammad Toha pada tanggal 5 Maret 2015 pukul 11.26 wib.

Menurut Sandi Setiwan selaku PFA KUR Mikro, bank BRI Unit Mohammad Toha sebelum pemberian kredit, kepala Unit BRI Mohammad Toha akan meneliti dan memastikan bahwa dokumen-dokumen yang berkaitan atau yang mendukung pemberian keputusan kredit masih berlaku lengkap, sah, dan berkekuatan hukum.¹⁴²

Setiap pejabat yang terlibat dalam kebijakan persetujuan pemberian kredit harus mampu memastikan hal-hal berikut:¹⁴³

¹⁴² wawancara dengan Sandi Setiwan selaku PFA KUR Mikro Unit Mohammad Toha pada tanggal 5 Maret 2015 pukul 11.26 wib.

¹⁴³ Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, Alfabeta, Bandung, 2003, hlm. 51.

1. Setiap kredit yang diberikan telah sesuai dengan prinsip perkreditan yang sehat dan ketentuan perbankan lainnya;
2. Pemberian kredit telah sesuai dan didasarkan pada analisis kredit yang jujur, objektif, cermat, dan seksama (menggunakan 5C's Principles) serta independent;
3. Adanya keyakinan bahwa kredit akan mampu dilunasi oleh debitur.

Kebijakan dari BRI Unit Mohammad Toha, yang dapat diberikan kredit usaha rakyat ini adalah debitur yang memiliki usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). BRI Unit Mohammad Toha tidak turut serta menyertakan koperasi, karena sampai saat ini BRI Unit Mohammad Toha belum memberlakukan *Linkage Program* dimana kredit terhadap UMKM dapat disalurkan melalui koperasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sandi Setiawan selaku PFA KUR Mikro Unit Mohammad Toha pada tanggal 5 Maret 2015 pukul 11.26 wib.

Pihak bank dalam melaksanakan pemberian kredit harus merumuskan dan melakukan kebijaksanaan kredit yang sehat. Kebijaksanaan ini dilakukan untuk menciptakan kebijaksanaan kredit yang sesungguhnya dan juga untuk meminimalisir resiko yang terdapat dalam setiap pemberian kredit.¹⁴⁴ Menurut **Kasmir**, dalam bukunya "*bank dan lembaga keuangan lainnya*". "kebijaksanaan yang diperlukan adalah mengenai jenis dan jumlah kredit yang hendak diberikan oleh bank kepada siapa diberikan dan dalam keadaan bagaimana kredit itu diberikan". Salah satu kebijakan yang dilakukan pihak BRI Unit Mohammad

¹⁴⁴ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya, Op.Cit*, hlm. 115.

Toha adalah fasilitas kredit usaha rakyat yang disediakan adalah kredit usaha rakyat mikro sampai dengan Rp 5,000,000.-.¹⁴⁵

Dalam setiap pencairan kredit (*disbursement*) harus terjamin asas aman, terarah dan produktif serta dilaksanakan apabila syarat yang ditetapkan dalam perjanjian kredit telah dipenuhi oleh pemohon kredit.¹⁴⁶ Setelah semua persyaratan terpenuhi dan pemberian kredit diikat oleh perjanjian kredit maka debitur dapat mengambil dana pinjaman yang telah dimohonkan kepada bagian *teller* BRI Unit Mohammad Toha. Waktu lamanya proses permohonan kredit usaha rakyat tanpa jaminan hingga tahap pencairan dana, mempunyai batas normal antara 2 sampai 7 hari.¹⁴⁷

Menurut Sandi Setiawan selaku PFA KUR Mikro Unit Mohammad Toha Tahap akad kredit/pencairan meliputi beberapa tahap yaitu tahap persiapan pencairan, penandatanganan perjanjian pencairan kredit, fiat bayar dan pembayaran pencairan kredit. terdapat langkah-langkah pada tahap akad kredit sebagai berikut:

1. Persiapan Pencairan.

Setelah Surat Keterangan Permohonan Pinjaman (selanjutnya disebut SKPP) diputus, *customer service* mencatatnya pada registrasi dan segera mempersiapkan pencairan sebagai berikut:

- a. Memberitahukan pada calon debitur bahwa permohonan KURnya telah mendapat persetujuan atau putusan dan kepastian tanggal

¹⁴⁵ wawancara dengan Sandi Setiawan selaku PFA KUR Mikro Unit Mohammad Toha pada tanggal 5 Maret 2015 pukul 11.26 wib

¹⁴⁶ Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, *Op.Cit*, hlm. 52.

¹⁴⁷ Hasil wawancara dengan Sandi Setiawan selaku PFA KUR Mikro Unit Mohammad Toha pada tanggal 5 Maret 2015 pukul 11.26 wib.

- pencairannya;
- b. Menyiapkan Surat Pengakuan Hutang;
 - c. Mengisi kuitansi pencairan KUR.
2. Penandatanganan Perjanjian Pencairan KUR.

Berkas atau kelengkapan pencairan disini adalah Surat Pengakuan Hutang, sebelum penandatanganan berkas pencairan KUR, *customer service* harus memastikan bahwa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pencairan kredit usaha rakyat telah ditandatangani oleh debitur sebagai bukti persetujuan debitur. Setelah itu, *customer service* meminta debitur untuk membaca dan memahami Surat Pengakuan Hutang (selanjutnya disebut SPH) dan menandatangani SPH tersebut selanjutnya diserahkan pada kepala unit untuk diperiksa. Untuk menjaga keamanan dan melaksanakan prinsip kehati-hatian maka *customer service* mencocokkan tanda tangan dengan tanda tangan debitur pada waktu pendaftaran, kemudian menyerahkan semua berkas kepada kepala unit untuk di fiat bayar.

3. Fiat Bayar .

Kepala unit memeriksa berkas tentang kebenaran dan kelengkapan pengisian berkas kredit usaha rakyat untuk dicocokkan dengan syarat yang disebutkan dalam putusan kredit, setelah yakin maka kepala unit membubuhkan tanda tangan sebagai persetujuan fiat bayar. Setelah selesai, kuitansi diserahkan pada teller dan berkas diserahkan pada *customer service*.

4. Pembayaran Pencairan KUR Tanpa Jaminan.

Pembayaran pencairan kredit usaha rakyat kepada debitur dilakukan oleh *teller* berdasarkan kuitansi yang diterima dari kepala unit dengan terlebih dahulu meneliti keabsahan kuitansi.

C. Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Tanpa Jaminan

Penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit usaha rakyat di Bank BRI Unit Mohammad Toha dilakukan dengan menggunakan analisis kredit terlebih dahulu sebelum menyalurkan kredit kepada nasabah. Analisis kredit adalah penelitian yang dilakukan oleh *Account Officer* terhadap kelayakan perusahaan, kelayakan usaha nasabah, kebutuhan kredit, kemampuan menghasilkan laba, sumber pelunasan kredit serta jaminan yang tersedia untuk menjamin permohonan kredit.¹⁴⁸

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia sebagaimana termuat dalam SK Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995, setiap permohonan kredit yang telah memenuhi syarat harus dianalisis secara tertulis dengan prinsip sebagai berikut :

- a. Bentuk, format, dan ke dalam analisis kredit ditetapkan oleh bank yang disesuaikan dengan jumlah dan jenis kredit;
- b. Analisis kredit harus menggambarkan konsep hubungan total permohonan kredit. Ini berarti bahwa persetujuan pemberian kredit tidak boleh berdasarkan semata-mata atas pertimbangan permohonan untuk satu transaksi atau satu rekening kredit dari pemohon, namun harus didasarkan atas dasar penilaian seluruh kredit dari pemohon kredit yang telah diberikan dan atau akan diberikan secara bersama-sama oleh bank;
- c. Analisis kredit harus dibuat secara lengkap, akurat, dan objektif yang sekurang-kurangnya meliputi;
 - 1) Menggambarkan semua informasi yang berkaitan dengan usaha dan data

¹⁴⁸ Rizal Calvary Marimbo, *Ayo ke bank, Dapatkan Kredit UMKM*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2008, hlm. 11.

- pemohon termasuk hasil penelitian pada daftar kredit macet
- 2) Penilaian kelayakan jumlah permohonan kredit dengan kegiatan usaha yang akan dibiayai, dengan sasaran menghindari kemungkinan terjadinya praktek *mark up* yang dapat merugikan bank;
 - 3) Menyajikan penilaian yang objektif dan tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan permohonan kredit.
- d. Analisis kredit sekurang-kurangnya harus mencakup penilaian tentang prinsip 5C dan penilaian terhadap sumber pelunasan kredit yang dititikberatkan pada hasil usaha yang dilakukan pemohon serta menyediakan aspek yuridis perkreditan dengan tujuan untuk melindungi bank atas resiko yang mungkin timbul;
 - e. Dalam penilaian kredit sindikasi harus dinilai pula bank yang bertindak sebagai bank induk (bank yang menjadi *lead bank*)

BRI Unit Mohammad Toha dalam melakukan analisis kreditpun mempunyai kebijakan yang tentunya berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia. Laporan keuangan calon debitur merupakan salah satu data pokok mutlak dalam hal analisis. Pada tahap ini, setelah syarat-syarat dilengkapi, pihak BRI Unit Mohammad Toha akan melakukan *cheking* antara Kartu Tanda Penduduk (selanjutnya disebut KTP) dan pemohon. Sasaran BRI Unit Mohammad Toha adalah masyarakat yang berdomisili di Mohammad Toha ataupun mereka yang tidak berdomisili di Mohammad Toha tetapi mempunyai usaha tetap di Mohammad Toha, sehingga untuk calon debitur yang berdomisili di luar mohammad Toha yang hendak mengajukan KUR Tanpa Jamian di BRI kawasan Mohammad Toha untuk terlebih dahulu harus mendapat ijin dari BRI tempatnya berdomisili. Hal ini dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan yang dapat dilakukan oleh calon debitur melalui *double credit*. Hasil wawancara dengan Rudi Riawan selaku Marketing KUR Unit Mohammad pada tanggal 5 Maret 2015 pukul 11.26 wib.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi BRI Unit Mohammad Toha Nomor: 02-KOM/BRI/06/2007- NOKEP: S.240-DIR/SKP/06/2007 tanggal 29 Juni 2007 tentang kebijakan Kredit Usaha Rakyat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.

Beberapa hal yang harus dipenuhi dalam cakupan kehati-hatian BRI Unit Moahammad Toha dalam memberikan kredit usaha rakyat tanpa jaminan:

1. Untuk Usaha Mikro:
 - a. Menyerahkan surat permohonan Kredit Usaha Rakyat yang ditandatangani pemohon dan istri/suami pemohon (apabila telah menikah);
 - b. Menyerahkan dokumen-dokumen pendukung sebagai berikut:
 - 1) KTP dan KK;
 - 2) Surat nikah, bila telah menikah;
 - 3) Perizinan usaha, misalnya surat izin dari Dinas Pasar bila usahanya di pasar, surat keterangan minimal Ketua RT/RW untuk lokasi usaha lingkungan pemukiman dan sejenisnya;
 - 4) Legalitas tempat usaha, bila ada, misalnya bukit hak atas tanah, perjanjian sewa, atau lainnya;
 - 5) Rincian peruntukan kredit;
 - 6) Agunan jika ada disyaratkan bank.
2. Untuk Usaha Kecil dan Menengah perorangan:
 - a. Menyerahkan surat permohonan Kredit Usaha Rakyat yang ditandatangani pemohon dan istri/suami pemohon (apabila telah

menikah);

b. Menyerahkan dokumen-dokumen pendukung sebagai berikut:

- 1) KTP dan KK;
- 2) Surat nikah (bila telah menikah);
- 3) NPWP untuk usaha Kredit di atas Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah);
- 4) Perizinan usaha sesuai bidang usaha seperti SIUP, TDP, dan sejenisnya atau sekurang-kurangnya memenuhi kriteria perijinan usaha mikro;
- 5) Legalitas tempat usaha, bila ada, msalnya bukit hak atas tanah, perjanjian sewa, atau lainnya;
- 6) Rincian peruntukkan kredit;
- 7) Catatan keuangan usaha, anantara lain berupa kuitansi, faktur, bon, pembukuan, rekening koran, dan sejenisnya;
- 8) Agunan, jika ada disyaratkan bank.

3. Untuk Usaha Kecil dan Menengah yang berbadan usaha dan koperasi:

a. Menyerahkan surat permohonan Kredit Usaha Rakyat yang ditandatangani Direksi atau ketua Badan Usaha;

b. Meyerahkan dokumen-dokumen pendukung sebagai berikut:

- 1) Akte pendirian perusahaan sampai dengan perubahan terakhir;
- 2) Menyerahkan NPWP;
- 3) Perizinan usaha sesuai bidang usaha seperti SIUP, TDP, dan sejenisnya atau sekurang-kurangnya memenuhi kriteria perijinan

usaha mikro;

4) Legalitas tempat usaha, misalnya bukti hak atas tanah, IMB, perjanjian sewa, atau lainnya;

5) Laporan keuangan terakhir atau minimal catatan keuangan usaha sebagaimana persyaratan untuk Usaha Kecil dan Menengah Perorangan;

6) Rincian peruntukan kredit;

7) Agunan, jika ada disyaratkan bank.

4. Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi pada saat akad kredit:

a. Menyerahkan asli dokumen-dokumen agunan KUR apabila dipersyaratkan dalam Surat Penegasan Persetujuan Kredit (SP2K) dari bank;

b. Menyerahkan surat kuasa pendebitan rekening giro atau tabungan yang bersangkutan di Bank untuk pembayaran biaya-biaya dan/atau kewajiban KUR.

5. Persyaratan-persyaratan pencairan kredit:

a. Perjanjian KUR dan akta-akta lainnya sebagaimana dipersyaratkan dalam Surat Penegasan Persetujuan Kredit (SP2K) telah ditandatangani;

b. Seluruh biaya realisasi KUR yang dipersyaratkan dalam Surat Penegasan Persetujuan Kredit (SP2K) telah dipenuhi;

c. Terdapat permohonan pencairan KUR yang ditandatangani oleh debitur khusus untuk badan usaha, penandatanganan mana dilakukan oleh pihak yang berwenang sesuai ketentuan dalam akta pendirian perusahaan dan

perubahannya.

Prinsip kehati-hatian Bank BRI Unit Mohammad Toha merupakan penentu dalam proses permohonan kredit, sehingga berpengaruh terhadap perjanjian kredit yang akan dibuat dengan nasabah sebagai debitur. Salah satu aspek dari prinsip kehati-hatian tersebut yang merupakan bagian analisis permohonan kredit yaitu, aspek *character*. Aspek karakter atau watak dari para calon debitur merupakan salah satu pertimbangan yang terpenting dalam memutuskan pemberian kredit. Bank sebagai pemberi kredit harus yakin bahwa calon debitur termasuk orang yang bertingkah laku baik, dalam arti selalu memegang teguh janjinya, selalu berusaha dan bersedia melunasi hutang-hutangnya pada waktu yang telah ditetapkan.

Pada tahap pemeriksaan, pihak BRI Unit Mohammad Tob ha dalam hal ini Mantri (selanjutnya disebut *account Officer(AO)*) akan melakukan *checking* serta peninjauan langsung ke lapangan tentang layak atau tidaknya calon debitur kredit usaha rakyat diberikan pinjaman dengan menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan permohonan KUR tersebut antara lain.¹⁴⁹

- a. Mencocokkan fotokopi bukti diri/ identitas lain sesuai dengan aslinya;
- b. Menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan usaha calon debitur kredit usaha rakyat. Misalnya: tentang modal, tentang pinjaman pada pihak lain.

Tujuannya adalah untuk menganalisis apakah calon debitur mampu mengembalikan pinjaman atau tidak;

- c. Menanyakan tentang keuntungan dari usaha calon debitur kredit usaha

¹⁴⁹ Wawancara dengan Rudi Riawan selaku Marketing KUR Unit Mohammad Toha pada tanggal 5 Maret 2015 pukul 11.26 wib.

rakyat dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan membayar pinjaman..

D. Penyelesaian Kredit Macet Dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Tanpa Jaminan

Penyelesaian kredit macet dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat tanpa jaminan oleh Bank BRI Unit Mohammad Toha dalam mencari jalan keluar yang lebih praktis, efisien, efektif dan menghemat waktu serta biaya. Bank BRI Unit Mohammad Toha melakukan beberapa tindakan penerobosan agar kerugian akibat kredit bermasalah dapat sedikit tertutupi. Upaya yang dilakukan BRI Unit Mohammad Toha dalam mengatasi kredit bermasalah adalah sebagai berikut:¹⁵⁰

Berdasarkan Surat Edaran Direksi Bank BRI Unit Mohammad Toha No.13/09/2009 tentang bentuk penagihan kredit yang diberikan, yaitu:

a. Melakukan penagihan secara terus menerus.

Metode penagihan yang dilakukan dengan bentuk, yaitu:

- 1) Dengan mantri/AO sendiri datang ke lapangan atau rumah debitur dengan membicarakan secara kekeluargaan atau lebih bersifat persusif;
- 2) Melalui surat/ penagihan secara tertulis;
- 3) Penagihan melalui tim.

b. Memperkuat analisis kredit.

Memperketat analisis kredit dilakukan dalam upaya pencegahan untuk menghindari adanya usaha rakyat yang masuk dalam kategori/klasifikasi Dalam Perhatian Khusus dan Kurang Lancar.

¹⁵⁰ Wawancara dengan Nova Nugraha selaku Kepala Unit BRI Mohammad Toha pada tanggal 6 Maret 2015 pukul 11.26 wib.

Menurut Nova Nugraha selaku Kepala Unit BRI Mohammad Toha, Menghadapi debitur yang lalai dalam melaksanakan pembayaran adalah hal yang biasa terjadi, untuk itu seorang mantri atau AO mempunyai cara sendiri untuk menghadapinya, yaitu dengan pembicaraan dua pihak secara persuasif yang bersifat kekeluargaan. Apabila keadaan debitur memang tidak memungkinkan untuk melakukan pembayaran, maka kredit usaha rakyat dapat diperpanjang jatuh tempo pelunasannya. Sebagai bahan pertimbangan pihak BRI Unit Mohammad Toha adalah program KUR ini ditujukan untuk rakyat kecil sehingga memperkecil kemungkinan untuk memberatkan mereka. Berdasarkan wawancara dengan Nova Nugraha agar permasalahan dalam pelaksanaan kredit usaha rakyat ini tidak berlanjut terus-menerus maka BRI Unit Mohammad Toha melakukan usaha-usaha sebagai berikut:

- a. Melaksanakan sosialisasi kredit usah rakyat (KUR) kepada masyarakat dan pihak-pihak yang terkait, bahwa kredit usaha rakyat adalah untuk usaha produktif yang menekankan usaha;
- b. Kredit usaha rakyat adalah merupakan pinjaman dari bank yang harus dikembalikan. Bahwa kredit usaha rakyat bukan hibah atau pemberian dari pemerintah;
- c. Kepala Unit melakukan monitoring dan evaluasi atas pelayanan kredit usaha rakyat.

Menurut Nova Nugraha selaku Kepala Unit BRI Mohammad Toha oleh karena kredit usaha rakyat adalah kredit tanpa jaminan, apabila terjadi kredit macet maka BRI Unit Mohammad Toha dapat mengajukan *claim* kepada PT

Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan perusahaan sarana pengembangan usaha sebagai pihak penjamin dari pemerintah untuk penjaminan sebesar 70% dari plafon, sedangkan 30% nya ditutup oleh BRI Unit Mohammad Toha.

Pengajuan *claim* kepada perusahaan penjamin mempunyai alur yang cukup lama dan berbelit. Prosedur pengajuan harus dilengkapi dengan syarat-syarat tertentu, yaitu seluruh data-data debitur yang ada pada bank beserta data-data lain, sebagai contoh diperlukannya data dari kelurahan sebagai syarat apabila debitur lalai melakukan kewajiban pembayaran angsuran akibat meninggalnya debitur tersebut. Contoh lainnya apabila debitur wanprestasi dalam hal pembayaran diakibatkan oleh usahanya mengalami kemunduran maka syarat yang harus dilengkapi dalam mengajukan *claim* ke perusahaan penjamin adalah dengan menyertakan bukti-bukti penagihan baik yang telah dibayarkan maupun yang belum dibayarkan.

Berdasarkan Surat Keputusan Bank Indonesia Nomor 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 mengenai upaya penyelamatan kredit, yang diadopsi pula oleh bank BRI Unit Mohammad Toha melalui Surat keputusan Direksi BRI Unit Mohammad Toha Nokep: 625-DIR/TSI/10/2009 tanggal 19 Oktober 2009 Tentang Upaya Penyelamatan Kredit yaitu:

a. Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*).

Merupakan penyelamatan kredit dengan cara melakukan perubahan syarat-syarat yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu kredit.

b. Persyaratan Kembali (*Reconditioning*).

Merupakan penyelamatan kredit dengan cara melakukan perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran jangka waktu dan atau persyaratan maksimal saldo kredit.

c. Penataan Kembali (*Restructuring*)

Yaitu penyelamatan kredit dengan cara melakukan perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut: penanaman dana bank dan atau konversi seluruh atau sebagian kredit menjadi penyertaan modal perusahaan yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali dan atau persyaratan kembali.

Berdasarkan wawancara dengan Nova Nugraha selaku Kepala Unit Mohammad Toha pada tanggal 6 Maret 2015 pukul 11.26 wib. agar permasalahan dalam pelaksanaan kredit usaha rakyat ini tidak berlanjut terus-menerus maka BRI Unit Mohammad Toha melakukan usaha-usaha sebagai berikut:

1. Melaksanakan sosialisasi kredit usaha rakyat (KUR) kepada masyarakat dan pihak-pihak yang terkait, bahwa kredit usaha rakyat adalah untuk usaha produktif yang menekankan usaha;
2. Kredit usaha rakyat adalah merupakan pinjaman dari bank yang harus dikembalikan. Bahwa kredit usaha rakyat bukan hibah atau pemberian dari pemerintah;
3. Kepala Unit melakukan monitoring dan evaluasi atas pelayanan kredit usaha rakyat.